

**FORMULASI PERATURAN NAGARI PAGADIH NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAHAN DAN HUTAN
NAGARI BERBASIS KAUM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



OLEH:

MUHAMMAD FARHAN

1710841008

Dibimbing Oleh:

Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc

Drs. Yoserizal, M.Si

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

ABSTRAK

Muhammad Farhan, 1710841008, Formulasi Peraturan Nagari Pagadiah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya lahan dan Hutan Nagari Berbasis Kaum. Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2024. Dibimbing oleh : Dr. Hendri Koeswara, S.ip, M.Soc.Sc dan Drs. Yoserizal, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 158 Halaman dengan referensi 6 buku teori, 8 buku metode, 10 jurnal, 1 perundang-undangan, 1 Peraturan Nagari, 2 Dokumen dan 7 website internet.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terhadap pemanfaatan segala bentuk sumberdaya yang ada di Nagari Pagadiah, Ninik mamak sebagai penghulu kaum memiliki kuasa terhadap anak kemenakan kaum dalam mengarahkan dan memberikan izin dalam pengelolaan sumberdaya yang ada di nagari Pagadiah. Hal ini kemudian berdampak kepada segala upaya yang dilakukan oleh golongan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, lembaga-lembaga nagari maupun Pemerintah Nagari Pagadiah dalam upaya mengelola serta memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lahan yang ada di Nagari Pagadiah. Pada tahun 2017 Nagari Pagadiah mendapatkan hak izin (Perhutanan Sosial) untuk mengelola lahan hutan produksi terbatas seluas ± 768 Ha dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Namun LPHN Pagadiah yang seharusnya memiliki kewenangan dalam merancang dan mengambil keputusan pengelolaan berdasarkan SK tidak terlaksana. Dengan demikian masuknya pendampingan dari Perhutanan Sosial 2022 berupaya menjembatani Pemerintah Nagari Pagadiah untuk membuat sebuah regulasi tentang Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya lahan dan Hutan Nagari Berbasis Kaum.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori konseptual Formulasi Kebijakan Publik Siklus Pendek menurut Ripley. Berdasarkan teori yang peneliti gunakan proses formulasi kebijakan ini dimulai dari *agenda setting* dan kemudian tahap formulasi dan legistimasi.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam perumusan rancangan peraturan Nagari Pagadiah ini bersumber dari inisiatif Pemerintah Nagari yang dijembatani oleh Fasilitator Perhutanan Sosial. Pada Tahap *Agenda Setting* proses perumusan Peraturan Nagari Pagadiah Nomor 2 Tahun 2023 tidak ada mobilisasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memasukan isu-isu masalah publik menjadi agenda pemerintah. Pada tahap Formulasi dan legistimasi, dalam merancang peraturan nagari pagadiah ini tidak melakukan advokasi maupun konsultasi sebelum diserahkan untuk di evaluasi oleh DPMN Kabupaten Agam.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya lahan dan Hutan Berbasis Kaum

ABSTRACT

Muhammad Farhan, 1710841008, Formulation of Nagari Pagadiah Regulation Number 2 of 2023 concerning Control and Management of tribe-based Nagari Land and Forest Resources. Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas, Padang, 2024. Mentored by: Dr. Hendri Koeswara, S.ip, M.Soc.Sc and Drs. Yoserizal, M.Si. This thesis consists of 158 pages with references to 6 theory books, 8 method books, 10 journals, 1 legislation, 1 Nagari Regulation, 2 documents and 7 internet websites.

This research is motivated by the problem of utilizing all forms of resources in Nagari Pagadiah, Ninik Mamak as the head of the community has the power over the children of the community in directing and giving permission in the management of resources in Pagadiah village. This then has an impact on all efforts made by community groups, community groups, village institutions and the Pagadiah Nagari Government in an effort to manage and utilize the potential of forest and land resources in Nagari Pagadiah. In 2017 Nagari Pagadiah received a permit (Social Forestry) to manage ± 768 Ha of limited production forest land from the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, but LPHN Pagadiah, which should have the authority to design and make management decisions based on the decree, was not implemented. Thus, the entry of assistance from Social Forestry 2022 seeks to bridge the Pagadiah Nagari Government to make a regulation on the Control and Management of Land Resources and Community-based Nagari Forests.

The method used in this research is descriptive qualitative. The data collection techniques used in this research are interviews, observation, and documentation. This research uses the conceptual theory of Short Cycle Public Policy Formulation according to Ripley. Based on the theory that researchers use, this policy formulation process starts from agenda setting and then the formulation and legitimation stages.

The results of this study found that the formulation of the draft regulation of Nagari Pagadiah originated from the initiative of the Nagari Government which was bridged by the Social Forestry Facilitator. At the Agenda Setting Stage of the formulation process of Nagari Pagadiah Regulation Number 2 of 2023, there was no mobilization carried out by the community to include public problem issues into the government agenda. At the Formulation and legitimation stage, in drafting the Pagadiah Nagari Regulation, there was no advocacy or consultation before it was submitted for evaluation by the DPMN of Agam Regency.

Keywords: Policy Formulation, Tribe-based Land and Forest Resources Control and Management